

SKRIPSI

**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA SURUANG
KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NURBAYAH

F01 13 011

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP)
pada Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2018**

ABSTRAK

NURBAYAH, F0113011 “PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA SURUANG KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR” dibimbing oleh Bapak Dr. H. Burhanuddin M.Si Bersama Dengan Bapak Pahrudin , S.IP., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Suruang , (2) Dampak KWT bagi perempuan di Desa Suruang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah pengelola/pengurus, petugas PPL dan anggota KWT Desa Suruang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemberdayaan perempuan melalui KWT di Desa suruang meliputi: (a) kegiatan pertanian yang dilakukan oleh KWT, (b) pertemuan rutin untuk membahas kemajuan KWT, 2) Dampak KWT bagi aktualisasi perempuan di Desa Suruang yaitu meningkatnya ilmu dan pengetahuan tentang pertanian, adanya perubahan perilaku pada anggota ke arah yang lebih baik, keberadaan KWT telah diakui dan bermanfaat untuk masyarakat. 3) Faktor pendukungnya yaitu partisipasi dan motivasi dari semua anggota KWT cukup tinggi, tersedianya fasilitas seperti lahan dan sarana pendukung pengolahan lahan di Desa Suruang, adanya kerjasama yang baik dari berbagai instansi terkait khususnya di bidang pertanian.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Perempuan, Kelompok Wanita Tani.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hasil kekayaan yang cukup melimpah namun, seperti yang kita tahu bersama bahwa kenyataan yang terjadi sebagian besar penduduk Indonesia masih berada dalam ekonomi menengah kebawah. Maka Dalam menghadapi Globalisasi seperti ini diperlukan komitmen bersama, untuk bersatu dengan semangat solidaritas dan membangun relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan¹. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, dimana Jumlah masyarakat miskin tampaknya semakin banyak, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar korban kemiskinan adalah perempuan dan anak. Masih banyak perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek sosial, budaya juga ekonomi. Hal ini disebabkan karena rendahnya kepercayaan terhadap kaum Perempuan dalam membuat perencanaan, melaksanakan program kegiatan, dan melakukan evaluasi serta menganalisis dampak pembangunan.

Sebagaimana tentang pandangan terhadap perempuan bahwa perempuan hanya bisa dilibatkan dalam urusan rumah tangga namun pada dasarnya perempuan mau dilibatkan dalam bidang apapun itu bisa dilakukan sesuai dengan tingkat kapabilitas yang mereka miliki. Keterbatasan kepercayaan terhadap perempuan dalam mengurus masalah pembangunan merupakan suatu penyebab

¹Frank tesoriero.2014. *Community Development Alternatif pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: pustaka pelajar

dari tertinggalnya suatu negara karena potensi-potensi yang mereka miliki tidak dapat terealisasi dengan baik. Dalam hal ini jika perempuan ikut diberdayakan maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu negara khususnya di Indonesia secara perlahan-lahan akan bisa mengurangi sedikit tingkat kemiskinan yang tengah menjadi masalah besar di negara Indonesia.

Kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagian besar perempuan Indonesia memiliki kualitas hidup yang rendah, kondisi ini diperparah lagi dengan struktur angkatan kerja perempuan Indonesia, yang didominasi oleh perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah². Diharapkan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam berbagai sektor publik maka perempuan juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan hal ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial ayat 1 bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya..

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan bangsa, disamping sumber daya alam (hayati, non hayati dan buatan) serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi³. Adapun Ruang lingkup pemberdayaan perempuan untuk saat ini sudah sampai di tingkat desa bahkan di tingkat rukun

² Adi isbandi rukminto.2008. Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Rajawali

³ Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : CV Mandar Maju.

tetangga (RT). Pemberdayaan perempuan dilakukan dari, oleh, dan untuk perempuan itu sendiri. Perempuan yang tinggal dikampung atau desa mayoritas hanya bermatapencaharian sebagai petani, pekebun, serta buruh dan sebagian kecil dari mereka yang bekerja sebagai guru, pejabat, PNS. Kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan akan pentingnya pemberdayaan sudah sangat tinggi. Pengetahuan dan ketrampilan akan membekali kaum perempuan untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan dan juga dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan di masyarakat.

Sebagaimana yang tersirat dalam batasan pemberdayaan menurut Kindervatter (1979) (2008:3) menyatakan: Pemberdayaan memiliki sifat yang lebih menekankan pada hasil akhir dari proses pemberdayaan tersebut yaitu masyarakat memperoleh pemahaman dan mampu mengontrol daya sosial, ekonomi, politik supaya bisa meningkatkan kedudukan dalam masyarakat⁴. Dalam arti pemberdayaan bisa meningkatkan kemampuan untuk memegang kontrol atas diri sendiri dan lingkungannya, adanya kesamaan dan kesepadanan kedudukan dalam hubungan kerja, bisa menempatkan bahwa masyarakat khususnya perempuan sebagai subjek bukan sebagai objek, dan dengan adanya pemberdayaan ini maka akan jelas terlihat dimana tingkat keadilan yang sebenarnya

Pada tingkat lokal seperti di kabupaten polewali mandar khususnya di Desa Suruang Kecamatan Campalagian merupakan salah satu desa yang sudah menjalankan program pemberdayaan perempuan. Di desa tersebut baru terbentuk

⁴ Kindervatter (1979). *Tentang Batasan Pemberdayaan*, (2008:3). Bandung PT. Refika Aditama

organisasi bagi pemberdayaan kaum perempuan sejak 2 tahun lalu. Mayoritas penduduk desa bermata pencaharian petani dan pekebun, kaum perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian juga cenderung lebih banyak dibanding dengan sektor wirausaha. Melihat kemampuan perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian cukup banyak dan adanya program yang diberikan oleh pemerintah bagi kaum perempuan, maka disepakati bersama bahwa di Desa Suruang kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar dibentuklah suatu program pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani Mekar (KWT MEKAR).

Kelompok Wanita Tani Mekar (KWT MEKAR) merupakan suatu wadah yang memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut andil dalam melakukan suatu pembangunan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri melainkan untuk kepentingan bersama (Daerah ataupun negara) . KWT (Kelompok Wanita Tani) digunakan sebagai sarana guna kelancaran kegiatan pembinaan kepada petani Desa Suruang untuk peningkatan kualitas sumber daya petani wanita. Salah satu kegiatan yang bisa mengaktualisasi kaum perempuan yaitu dengan mengikuti Pelatihan-pelatihan yang berhubungan langsung dengan kelompok wanita tani. KWT (Kelompok Wanita Tani) Desa Suruang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi perempuan di desa tersebut untuk menyalurkan kemampuannya dalam mengolah lahan pertanian dan melalui berbagai kegiatan yang diadakan oleh KWT(Kelompok Wanita Tani) dapat meningkatkan aktualisasi mereka di lingkungan soasialnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi bahwa Sebagian besar penduduk miskin berada di daerah perdesaan, Keterbatasan peluang kerja terutama bagi perempuan di perdesaan serta Pemberdayaan perempuan belum menjadi prioritas penting terkhusus dalam hal pembangunan. Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti hanya dibatasi pada studi tentang pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani Mekar (KWT MEKAR) bagi aktualisasi perempuan di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberdayaan perempuan Melalui kelompok Wanita Tani Mekar (KWT MEKAR) di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten polewali mandar.
2. Apa saja dampak Kelompok Wanita Tani Mekar (KWT MEKAR) terhadap kesejahteraan perempuan di Desa Suruang.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mendeskripsikan Pemberdayaan perempuan melalui kelompok Wanita Tani Mekar (KWT MEKAR) di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui dampak Kelompok Wanita Tani Mekar (KWT MEKAR) Terhadap kesejahteraan perempuan di Desa Suruang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai penelitian di atas, maka mamfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan meningkatkan kajian Ilmu politik pada khususnya pada bidang kebijakan pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

- b. Manfaat Praktis

Perempuan-perempuan anggota KWT (Kelompok Wanita Tani) Desa Suruang menyadari bahwa mereka sangat dihargai dan dibutuhkan keberadaannya dalam ketahanan keluarga dan pembangunan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di daerah setempat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan menjadi basis utama dalam pembangunan masyarakat. Kindervatter, 1975 (dalam Saleh Marzuki, 2010: 221) mengatakan bahwa Pemberdayaan sebagai upaya untuk membuat orang memperoleh pemahaman pengendalian tentang kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik guna memperbaiki kedudukannya di masyarakat⁵. Sedangkan Winarni, (dalam Ambar Teguh Sulistiyani, 2004:79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya kemandirian⁶.

Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat luas untuk mengembangkan ketrampilan yang mereka miliki untuk meningkatkan kreatifitas dan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah pembatasan

⁵ Kindervatter (1975). *Tentang konsep Pemberdayaan*, (Dalam Saleh Marzuki, 2010 : 221). Bandung PT. Refika Aditama

⁶ Winarni (2012). *Menuju masyarakat mandiri yang berdaya*, (dalam ambar teguh sulistiyani, 2004 : 79). Jakarta Gramedia Pustaka Utama.

waktu dan dana. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai objek melainkan juga sebagai subjek. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.

Pemberdayaan diharapkan menjadikan masyarakat mandiri dan berdaya. “Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan pribadi, antarpribadi atau politik sehingga individu-individu, keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi-situasi mereka⁷”. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka”. Pemberdayaan dimaksudkan menentukan masa depan masyarakat secara mandiri.

Pemberdayaan berkaitan dengan pengembangan masyarakat karena pemberdayaan memerlukan potensi lokal yang perlu dikembangkan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang semula objek menjadi subjek. Akan tetapi, tidak sekedar mengubah masyarakat dari objek menjadi subjek, didalamnya juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah. Peran pemerintah harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu mengantisipasi masa depan. Dalam hal ini masyarakat memiliki kemampuan

⁷ Sugietter (2012). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (2003:37). PT. Radika Aditama

untuk identifikasi kebutuhan, identifikasi sumber daya, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada. pemberdayaan merupakan proses dan cara meningkatkan kekuatan pribadi, antar pribadi atau politik sehingga individu-individu, keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Selain daripada itu Pemberdayaan juga disebut sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya.

2.2 Pengertian Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan gender yang mana perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Perempuan dalam ajaran islam tidak dibatasi ruang gerak hanya pada sektor domestik di rumah tangga, melainkan dipersilahkan aktif di sektor publik termasuk dibidang iptek, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, HAM dan politik⁸. Tetapi harus digaris bawahi bahwa perempuan yang aktif dalam sektor publik tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan untuk

⁸ Asghar, Ali Enginer, Terj : Farid Wadji dan cici farkha assegaf. *Hak-hak perempuan dalam islam*. (Yogyakarta, yayasan bentang budaya: 1994).

menjalankan fungsi-fungsinya sebagai seorang perempuan didalam sebuah urusan rumah tangga.

Berbicara masalah perempuan berarti berbicara tentang suatu permasalahan yang tengah terjadi di negara indonesia karena kaum perempuan saat ini masih menghadapi beragam masalah dalam mengakses pendidikan, pelatihan, dalam mendapatkan pekerjaan dan memperoleh perlakuan yang sama dalam suatu pekerjaan. Pada gilirannya akan merugikan masyarakat dan perekonomian indonesia mengingat hilangnya kontribusi besar yang dapat diberikan oleh kaum perempuan melalui tempat kerja.

Meskipun perempuan Indonesia lebih maju pada hari ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, tetapi hal tersebut ternyata tidak memberikan kontribusi yang cukup baik bagi posisi perempuan di tempat kerja. Pemerintah bahkan lebih memomorduakan penyelesaian masalah diskriminasi perempuan sehingga masalah ini seakan-akan terlihat hanya milik kaum perempuan saja, bukan sebagai permasalahan bersama antara laki-laki dan perempuan. Perbaikan nasib pekerja perempuan kerap menimbulkan banyak kontroversial dan merupakan isu yang tak pernah habis untuk diperbincangkan. Ketika perempuan masuk di dunia kerja, sering mengalami pola diskriminasi dan peminggiran yang didasari pada keyakinan dan perilaku yang menetapkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibanding pekerja laki-laki. Nasib pekerja perempuan bergantung kepada kepedulian pemerintah untuk lebih serius memikirkan serta memberi perlindungan terhadapnya.

Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam berbagai hal. Untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi sejauh mana perempuan terlibat dalam program-program pembangunan⁹.

Sudah banyak pengalaman yang memperlihatkan bahwa kaum perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dan bahkan dalam beberapa kasus kaum perempuan dapat menghasilkan karya yang lebih baik dan kaum perempuan telah memperlihatkan kiprah jati dirinya melalui berbagai karya di berbagai bidang. Lahirnya UU Nomor 6 Tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), selain merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman desa, juga hendak mendorong prakarsa dan gerakan masyarakat desa untuk kesejahteraan warga desa. Dengan demikian, UU Desa juga menjadi instrumen untuk mendorong dan memberikan kesempatan kepada perempuan dan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuannya dimana UU Desa membuka peluang bagi perempuan desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

⁹ Handayani, Trisakti dan Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Edisi Revisi cetakan kedua UMM Press Malang, 2006.

2.3 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah. Gagasan yang terkandung dalam pembangunan masyarakat pada hakikatnya tidak sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi.

Pembangunan masyarakat merupakan usaha untuk membentuk kemandirian pada seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat mensyaratkan adanya partisipasi, kreatifitas, dan inisiatif dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang telah ada guna mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat itu sendiri¹⁰. Pemberdayaan masyarakat memusatkan pada partisipasi dan kemampuan masyarakat lokal dengan mendayagunakan sumber daya yang ada dengan kreatifitas dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini maka masyarakat perlu dilibatkan langsung dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Konsep pembangunan masyarakat mencoba meletakkan manusia sebagai unsur yang mutlak dalam suatu proses pembangunan. Namun di sisi lain, pembangunan masyarakat menghendaki terwujudnya suatu konsep pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

¹⁰ Fahrudin Adi. (2012). *Pemberdayaan Partisipasi Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung : Humaniora

adapun beberapa ciri utama dari konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) sumber perencanaan pembangunan adalah prakarsa dan inisiatif masyarakat; (2) penyusunan program oleh masyarakat; (3) teknologinya merupakan teknologi tepat guna yang bersumber dari ide dan kreatif masyarakat; (4) mekanisme kelembagaan bersifat bottom up; (5) menekankan pada proses dan hasil; (6) evaluasi berorientasi pada dampak dan peningkatan kapasitas masyarakat; (7) orientasinya adalah terwujudnya kemandirian masyarakat.

2.4 Bentuk – bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan fokus kegiatan/ aktivitas atau potensi yang perlu dikembangkan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat “fokus pada beberapa sektor, yaitu; sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor usaha kecil, sektor pertanian, pemberdayaan potensi wilayah, pemberdayaan didaerah bencana, pemberdayaan kaum disabilitas, pemberdayaan model Corporate Sosial Responsibility (SCR), pemberdayaan perempuan.....”. Bentuk-bentuk pemberdayaan menurut Anwas dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemberdayaan sektor pertanian

Pemberdayaan petani diarahkan untuk mengubah perilaku petani. Kebiasaan- kebiasaan lama mulai dari perencanaan tanam, pengolahan lahan, pembibitan, pemeliharaan, panen, pasca panen, hingga pemasaran yang kurang produktif perlu diubah dengan kebiasaan baru yang lebih menguntungkan dan produktif.

2) Pemberdayaan perempuan

Peran perempuan terutama dikalangan keluarga miskin masih terkesan termarjinalkan. Perempuan masih identik dengan urusan “dapur, sumur dan kasur”. Pekerjaan perempuan terbatas pada mengurus rumah tangga. Jika suami istri bekerjasama dalam mencari nafkah keluarga berarti menyatukan dua kekuatan.

2.5 Pemberdayaan Perempuan

Saat ini diakui atau tidak, tampaknya pemerintah tetap berharap agar sendi pembangunan didasarkan pada potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam berbagai bidang keahliannya¹¹. Dewasa ini kata pemberdayaan mulai sering terdengar, dan saling berkaitan dengan pembangunan. Selama ini pembangunan selalu identik dengan pembangunan fisik semata, namun saat ini orientasi pembangunan telah bergeser kepada rakyat. Masyarakat diberdayakan untuk menggali segala potensi yang ada di dalam diri serta aktif berpartisipasi dalam segala bentuk segi kehidupan demi keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Konsep pembangunan kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan berkembang menjadi pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui penciptaan situasi-

¹¹ Dr. Marsuku, SE., *Pemikiran dan strategi Pemberdayaan*. Edisi pertama –jakarta penerbit Mitra Wacana media, 2006.

situasi yang kondusif sebagai motivator dalam sebuah pembangunan. Pemberdayaan Perempuan merupakan usaha untuk menciptakan perubahan pada lingkungan hidupnya dengan menggunakan usaha dan kemampuan diri sendiri.

Pemberdayaan perempuan dapat dikatakan suatu kemampuan untuk lebih berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan dan bisa juga sebagai suatu kemampuan memanfaatkan sumber daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Sebagaimana dalam Perpres No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Pemberdayaan perempuan pasal 13 yaitu:

- a. Meningkatkan Ketahanan Hidup
- b. Meningkatkan Usaha Ekonomi, dan
- c. Meningkatkan Partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian.

pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk memandirikan perempuan lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan perempuan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu perempuan sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan¹². Selanjutnya menurut Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam

¹² Mardikanto Tentang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013. Hal 52. Bandung Alfabeta

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi¹³.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi), pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya.

Program pemberdayaan perempuan diarahkan agar perempuan tumbuh dan berkembang menjadi perempuan yang berdaya, dimana perempuan tersebut memiliki kemampuan dalam mengatasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Dalam penelitian ini, pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan dan pelatihan melalui program-program yang telah direncanakan.

¹³ Suharto, *Tentang Pemberdayaan dan Perubahan Sosial* TAHUN 2014. Hal 59. Jakarta Raja Grafindo Persada.

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui keberhasilan sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indikator pencapaian keberhasilannya. Adapun indikator pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
2. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
3. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup perempuan, dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang/sektor kehidupan. Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan sehingga mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, khususnya peran perempuan sebagai bagian dari pelaku

pembangunan, maka perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan potensi perempuan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Selama ini perandaa kedudukan perempuan masih berada pada pihak yang dirugikan, dan laki-laki selalu pada pihak yang beruntung. Mengatasi masalah ketidakberdayaan tidak mudah. Salah satu cara yang dianggap mampu untuk mengatasi ketidakberdayaan kaum perempuan tersebut adalah melalui program pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Tujuan pemberdayaan perempuan:

1. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan.
3. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan.
4. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan.

2.6 Gender

Gender dalam Webster's New Word Dictionary, diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku, sementara itu dalam khazanah ilmu sosial, istilah gender diperkenalkan untuk mengacu pada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan tanpa konotasi yang bersifat biologis¹⁴. Fakta menunjukkan bahwa yang kurang mendapat perhatian peneliti adalah posisi perempuan di dalam masyarakat, meskipun banyak penelitian yang berbicara tentang perempuan akan tetapi tidak banyak yang mengangkat kepermukaan posisi perempuan dalam relasi Gender¹⁵.

Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya

¹⁴ Remisal.2013. *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunikasi Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

¹⁵ Rabihatun rauf. *Metodologi Penelitian Gender*, (Badan Penerbit : Universitas Negeri Makassar) 2008

gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktifitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender itu melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki¹⁶. Perbedaan gender sering menimbulkan ketidakadilan gender (gender inequalities), terutama terhadap kaum perempuan baik dilingkungan rumah tangga, pekerjaan, masyarakat, kultur, maupun negara. Ketidakadilan tersebut termanifestasi dalam berbagai macam bentuk antara lain:

a. Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses peminggiran/penyingkiran terhadap suatu kaum yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan pelemahan ekonomi kaum tersebut. Marginalisasi terjadi karena berbagai hal, seperti kebijakan pemerintah, keyakinan, agama, tradisi, kebiasaan, bahkan karena asumsi ilmu pengetahuan sekalipun.

b. Subordinasi

Subordinasi merupakan penempatan kaum tertentu (perempuan) pada posisi yang tidak penting. Subordinasi berawal dari anggapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah kaum yang

¹⁶ Handayani, Trisakti dan Sugiarti Konsep dan teknik penelitian Gender edisi revisi cetakan kedua UMM Press malang, 2006

irrasional atau emosional sehingga kaum perempuan tidak cakap dalam memimpin.

c. Kekerasan (violence)

Kekerasan (violence) adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan karena gender disebut gender related violence. Kekerasan tersebut terjadi karena disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan gender antara lain: pemerkosaan, serangan fisik dalam rumah tangga, kekerasan dalam pelacuran dan pornografi, pemaksaan dalam sistem sterilisasi keluarga berencana serta pelecehan seksual.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan perempuan melalui KWT (Kelompok Wanita Tani) di Desa Suruang

Pelaksanaan kegiatan KWT (Kelompok Wanita Tani) antara lain pertemuan rutin bulanan yang di antaranya membahas tentang kegiatan-kegiatan KWT kedepan, kemajuan KWT, sosialisasi dari PPL yang berisi mengenai pengembangan program pertanian. Kegiatankegiatan KWT telah berhasil membuat anggota KWT untuk bisa mengatur keuangan mereka demi aktualisasi mereka di lingkungan masyarakat. Pengembangan program pertanian bersama PPL telah berhasil membuat anggota KWT untuk bisa membuat sebuah perencanaan secara tepat agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan maksimal.

Tujuan yang tercapai sangat mempengaruhi mereka dalam aktualisasinya di lingkungan masyarakat. Laporan bulanan membahas mengenai semua aspek yang ada di KWT baik dari segi keuangan, administrasi, dan kemajuan KWT. Aktualisasi anggota KWT di lingkungan masyarakat bisa dilihat melalui sejauh mana tanggung jawab

anggota tersebut terhadap eksistensi KWT dan mampu menerapkan sebuah perencanaan, proses serta hasil yang dicapai dalam kehidupan bermasyarakat. Selain kegiatan pertemuan rutin, kegiatan KWT lainnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan instruksi dari pimpinan yang sifatnya tidak menentu.

2. Dampak Kelompok Wanita Tani bagi perempuan di Desa Suruang

Dampak KWT bagi aktualisasi perempuan melalui KWT Desa Suruang antara lain ilmu dan wawasan tentang dunia pertanian semakin bertambah, setelah mengikuti KWT adanya perubahan perilaku dari setiap individu/anggota ke arah yang lebih baik, dan ibu-ibu bisa lebih mengaktualisasikan dirinya terhadap kelompok maupun masyarakat sekitar. Dengan adanya KWT maka perempuan dapat lebih meningkatkan aktualisasinya dan perempuan menyadari bahwa keberadaannya terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan masyarakat. KWT benar-benar telah berpengaruh terhadap aktualisasi perempuan di Desa Suruang.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan KWT di Desa Suruang

Faktor pendukung kegiatan KWT yaitu partisipasi dan motivasi dari semua anggota KWT cukup tinggi, tersedianya fasilitas yang cukup mendukung di Desa Suruang, adanya kerjasama yang baik dari berbagai instansi terkait khususnya di bidang pertanian, dan dukungan dari

masyarakat sekitar cukup baik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan KWT adalah sedikitnya perhatian pemerintah khususnya pada kelompok wanita tani. Hal ini nampak pada pemberian bantuan yang sangat terbatas, selain itu SDM wanita tani belum dikembangkan secara maksimal. SDM wanita tani tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan kaum perempuan yang menyulitkan terjalannya keselarasan.

B. Saran

Hasil penelitian terhadap pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani (KWT) bagi aktualisasi perempuan di Desa Suruang, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perhatian pemerintah terhadap pertanian dan bidang pangan perlu ditingkatkan terkait jumlah KWT sudah cukup banyak namun tidak semuanya berjalan optimal. Sarana-prasarana yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
2. Untuk meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan sumber daya manusia sekaligus sumber daya alam yang ada di Desa Suruang perlu diadakan pelatihan-pelatihan yang lebih beragam.
3. KWT Desa Suruang jangan terpaku pada penanaman bibit-bibit sayuran saja tetapi juga perlu mengembangkan penganekaragaman pangan.
4. KWT Desa Suruang perlu memperluas jaringan kerja sama dengan sesama KWT baik dalam satu Kecamatan maupun ke luar Daerah.
5. Kontribusi tokoh masyarakat terkait aktualisasi perempuan melalui KWT Desa Suruang perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto.2008. *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali
- Asghar, Ali Enginer, Terj : Farid Wadji dan cici farkha assegaf. *Hak-hak perempuan dalam islam*. (Yogyakarta, yayasan bentang budaya: 1994).
- Dr. Marsuku, SE., *Pemikiran dan strategi Pemberdayaan*. Edisi pertama –jakarta penerbit Mitra Wacana Media, 2006
- Frank tesoriero.2014. *Community Development Alternatif pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fahrudin Adi. (2012). *Pemberdayaan Partisipasi Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung : Humaniora
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* . Edisi Revisi cetakan kedua UMM Press malang, 2006
- Kindervatter (1979).*Tentang Batasan Pemberdayaan*, (2008:3). Bandung PT. Refika Aditama
- Kindervatter (1975). *Tentang konsep Pemberdayaan,(Dalam Saleh Marzuki, 2010 : 221)*.Bandung PT. Refika Aditama
- Mardikanto *Tentang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013*. Hal 52. Bandung Alfabeta

Rabihatun rauf. Metodologi Penelitian Gender, (Badan Penerbit : Universitas Negeri Makassar) 2008

Remisal. 2013. *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunikasi Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : CV Mandar Maju

Sugietter (2012). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (2003:37). PT. Radika Aditama

Suharto, Tentang Pemberdayaan dan Perubahan Sosial TAHUN 2014. Hal 59. Jakarta Raja Grafindo Persada

Winarni (2012). *Menuju masyarakat mandiri yang berdaya, (dalam ambar teguh sulistiyani, 2004 : 79)*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.

UU Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Perpres No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan pasal 13

Wawancara Oleh Ibu Nurjannah Samad S.IP Tentang *Program Pemberdayaan Perempuan di Desa Suruang dalam Bentuk Program Kelompok Wanita Tani*. Rabu, 17 Januari 2018 pukul : 10:00

Wawancara Oleh Ibu Arfah S.Pd Tentang *Program Pemberdayaan Perempuan di Desa Suruang Dalam Bentuk Program Kelompok Wanita Tani*. Minggu, 21 Januari 2018. Pukul 11: 20

Wawancara Oleh Ibu Asma Tentang *program Pemberdayaan Perempuan di Desa Suruang Dalam bentuk Program Kelompok Wanita Tani*. Rabu, 24 Januari 2018. 09:00

Wawancara Oleh Bapak Misbahuddin Tentang *Program Pemberdayaan Perempuan di Desa Suruang Dalam Bentuk Program Kelompok Wanita Tani*. Senin, 29 Januari 2018. 09:30

Wawancara Oleh Ibu Nurhayati Tentang *Program Pemberdayaan Perempuan di Desa Suruang Dalam Bentuk Program Kelompok Wanita Tani*. Rabu, 31 Januari 2018. 10:25